



Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang

Harvi Dasnoer¹, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang

Received: 24 Juli 2023
Revised : 31 Juli 2023
Accepted: 04 Agustus 2023

Abstract

The importance of using information technology as best as possible is the main goal in realizing Padang Smart City, to improve services and make it easier and more concise, in today's all-digital era. Public services can only function successfully and efficiently after that. To realize good governance, the government must be able to run and utilize information and communication technology.

One of the efforts to improve the quality of internal administrative services between agencies within the Padang City Government is by implementing the Integrated Dynamic Archive Information System (Srikandi) application. Srikandi aims to create smoothness in requirements and electronic filing that is effective in administering government.

The research method used in writing this article is a qualitative research method. This article uses a descriptive research method with a deductive approach. The data collected are data derived from interview scripts, field notes, personal documents, memo notes and other official documents. The sample of government agencies selected in writing this article is North Padang District. The theory used in testing the implementation of the application of Srikandi is according to George C. Edward III.

Based on the results of the study, it shows that the implementation of the Srikandi application in North Padang District in improving mail administration services has been implemented properly

Keywords: Policy Implementation, Application

(*) Corresponding Author: wasanaharvi@yahoo.com

How to Cite: Dasnoer H, Frinaldi A, & Magriasti L. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8242137>

PENDAHULUAN

Seiring dengan Visi Indonesia 2045 dan untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka Pemerintah Kota Padang mulai menggunakan teknologi (*digital governance*) dalam memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan Walikota Padang ialah dengan menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini dibuat sebagai pedoman dan landasan hukum bagi perencanaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang terintegrasi juga disebut *smart government* dalam mewujudkan *Padang Smart City*.

Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebaik mungkin merupakan tujuan utama dalam mewujudkan *Padang Smart City*, untuk meningkatkan layanan dan membuatnya menjadi lebih mudah dan lebih ringkas, di zaman yang

serba digital saat ini. Pelayanan publik hanya dapat berfungsi dengan sukses dan efisien setelah itu. Untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, pemerintah harus bisa menjalankan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi internal antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Padang yaitu dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Peluncuran aplikasi Srikandi ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang pada tanggal 11 Januari 2023 di Balaikota, dengan dikuatkan melalui produk kebijakan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Padang tentang Instruksi Penerapan Aplikasi Srikandi di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Aplikasi Srikandi adalah instrumen pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diresmikan bertepatan dengan Ulang Tahun Kearsipan yang ke-50 dengan tema “Tahun Emas Kearsipan : Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital”.

Srikandi bertujuan menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional. Dengan adanya aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi ini mampu meningkatkan pemahaman kapasitas dan keterampilan Aparatur Sipil Negara pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Melalui kearsipan berbasis digital dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi akuntabilitas dan memori kolektif bangsa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Srikandi ini di lingkungan Kota Padang, sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas dan percepatan *good governance*.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan surat kabar (Moleong, 2015). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan deduktif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. (Moleong dalam Tami & Putri, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Padang Utara yang menggunakan aplikasi Srikandi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III sebagai alat analisis, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Surmansyah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi

Dalam penulisan ini penulis menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III sebagai alat analisis, yakni:

a. Komunikasi

Menurut Turner (2008:5) “Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka”. Komunikasi yang dijalin baik dari Pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu inovasi agar terciptanya kesamaan informasi sehingga apa yang diharapkan pemerintah selaku pelaksana inovasi tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Padang Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan ASN selaku pengguna aplikasi Srikandi, bahwa masih adanya ASN di Kecamatan Padang Utara terutama pada 7 (tujuh) Kantor Lurah yang belum mengetahui apa itu Aplikasi Srikandi. Tentu saja ini dapat diartikan bahwa tidak meratanya penyebaran informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang pada umumnya dan Pihak Kecamatan Padang Utara.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumberdaya manusia merupakan masalah yang paling kompleks karena dapat menyebabkan sumber daya lain berfungsi, menciptakan efisiensi, efektivitas dan peningkatan produktivitas (Sanusi, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi jelas dan konsisten ketentuan-ketentuan atau atura-aturan jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu inovasi. Karena walaupun inovasi tersebut baik namun tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas maka inovasi tersebut bisa dikatakan gagal. Dalam implementasi penerapan aplikasi Srikandi di Kecamatan Padang Utara, ASN yang dapat mengoperasikan aplikasi ini hanya 16 orang dari total 65 orang ASN di Kecamatan Padang Utara. Hal ini terjadi karena usia dari ASN yang sudah lanjut, gagap teknologi dan kurangnya kemauan untuk belajar dan memahami aplikasi Srikandi.

Sumberdaya non manusia dalam artikel ini diklasifikasikan yaitu dana, sarana dan prasaran penunjang dari pelaksanaan aplikasi Srikandi. Dari segi dana yang dikeluarkan adalah nihil atau tidak ada. Hanya saja kekurangan pada sarana

dan prasarana penunjang yang dibutuhkan adalah computer. Dari hasil temuan di lapangan peneliti masih menemukan adanya computer di Kecamatan Padang Utara yang sudah harus d *upgrade software* sehingga kecepatan dalam menjalankan aplikasi Srikandi cepat dan tepat. Disamping itu, jaringan internet sangat berpengaruh signifikan terhadap kestabilan penggunaan aplikasi Srikandi ini. jika jaringan internet sedang bermasalah hal ini bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan administrasi persuratan.

c. Disposisi

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dalam penerapan aplikasi Srikandi ini ASN cenderung belum mengetahui dan tidak memanfaatkan aplikasi ini, menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di ASN Kecamatan, bahwa beberapa ASN sudah mencoba tapi tidak memahami prosedur penggunaan aplikasi ini dalam arti kata aplikasi ini kurang bisa untuk dipahami dan belum sederhana, ada juga yang mengatakan bahwa yang bersangkutan gagap teknologi dan hal teknis lainnya.

Namun disisi lain, ada beberapa para ASN Kecamatan, menurut hasil wawancara penulis, merasa terbantu dan dapat menggunakan aplikasi Srikandi karena faktor pengetahuan, dan kemampuan ASN tersebut. Intensitas disposisi implementor adalah preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Subarsono, 2010). Dalam hal ini intensitas disposisi implementor cukup baik dan mendukung terhadap aplikasi ini.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi dengan instansi lain dilaksanakan dalam rangka menjalin kerjasama antar instansi terkait dalam menyukkseskan aplikasi Srikandi ini. Terlihat setiap periodenya, Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang meminta data pengguna Aplikasi Srikandi setiap Perangkat Daerah, sehingga aplikasi ini dapat disempurnakan kedepannya.

2. Kendala

Dari pelaksanaan wawancara dan observasi penulis lakukan menemukan beberapa kendala terhadap implementasi Srikandi. Menurut Hansen dan Mowen dalam (Haksama, 2016) mengelompokkan jenis kendala berdasarkan asalnya menjadi dua yakni kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala dalam implmentasi penerapan aplikasi Srikandi ini diantaranya :

a. Kendala Internal

Kendala internal yakni kendala yang dirasakan dari dalam organisasi. Organisasi dalam artikel ini yaitu Kecamatan Padang Utara. Kendala yang dihadapi dari segi Internal yakni Kurangnya pemahaman sumber daya manusia (Aparatur Pemerintahan) dalam pengaplikasian Srikandi. Masih ada aparat yang belum memahami mengoperasikan aplikasi Srikandi, sehingga Aparatur yang belum memahami, meminta bantuan kepada Aparatur yang paham sehingga efektivitas dalam bekerja belum tercapai. Selanjutnya, jika jaringan internet yang tersedia di Kecamatan sedang mengalami masalah dan tidak dapat digunakan dalam sementara waktu, maka hal ini menjadi kendala dan menghambat pelayanan persuratan, serta hal teknis lainnya dalam penggunaan aplikasi ini.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala yang dihadapi dari luar organisasi. Adapun kendala yang dihadapi Kecamatan Padang Utara yaitu belum adanya pedoman atau petunjuk teknis dari Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang selaku *leading sector* dalam penerapan aplikasi Srikandi.

3. Upaya

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang selaku *leading sector* dalam penerapan aplikasi Srikandi dalam mengatasi kendala yang terjadi yakni dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada instansi-instansi yang ada di lingkungan Kota Padang. Disamping itu, sesuai arahan Bapak Sekretaris Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga membuka layanan pengaduan atau konsultasi kepada Aparatur yang mengalami kendala dalam mengoperasikan aplikasi Srikandi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan aplikasi Srikandi di Kecamatan Padang Utara telah dilaksanakan namun belum terimplementasikan dengan baik ditandai dengan belum terpenuhinya dengan baik indikator implementasi.

Aplikasi Srikandi sangat membantu dalam proses administrasi persuratan di lingkungan internal Pemerintah Kota Padang, mulai dari tidak adanya lagi kertas / *paperless*, hingga kecepatan waktu dalam pengiriman surat antar instansi pemerintah.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah Kota Padang, dan khususnya pihak Kecamatan Padang Utara adalah dengan melakukan komunikasi intens dan *supervisi* kepada Aparatur di Kecamatan Padang Utara yang belum bisa mengoperasikan dengan baik penggunaan aplikasi Srikandi. Karena kemajuan teknologi akan terus berjalan dan visi Pemerintah Kota Padang sebagai *Padang Smart City* akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, M. M., & Garson, G. D. (2011). *Public information technology and e-governance: managing the virtual state*. Jones & Bartlett Learning;
- Hamid, S. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan* : Yogyakarta : Deepublish
- Meiyenti, I. (2020). Implementasi Inovasi E-Kelurahan : Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik pada Kelurahan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 1(2)
- Maleong, L.J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*: Bandung : PT Remaja
- Mariano, S. (2018). Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo [Thesis, Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80061>;
- Nazir, M . 2014 . *Metode Penelitian* : Bogor : Ghalia Indonesia
- Novriando, A. (2020). Efektivitas “Jogja Smart Service” Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 68–75.

- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset. *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 17. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>;
- Rahman, A. S. (2016). Implementasi Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terhadap Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin]. <https://core.ac.uk/reader/198216160>;
- Risnandar. (2014). Analisis e-government dalam peningkatan pelayanan publik pada dinas komunikasi dan informatika provinsi Sulawesi Tengah. *EJurnal Katalogis*, 2(7), 192– 199.
- Subarsono. 2015 . *Analisis Kebijakan Publik* : Jogjakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2014 . *Memahami Penelitian Kualitatif* : Bandung : CV. Alfabeta
- Sumarsyah, W., Jendrius, J., & Putera, R. E. (2021). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi (Studi Di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Niara*, 13(2), 37-45
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik